

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI)
PROVINSI BANTEN DALAM MENINDAKLANJUTI
PENANGANAN PERKARA PUNGUTAN LIAR PADA
PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN**

TESIS

OLEH :

Fatimatuz Zuhroh

202220251035



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Tesis : **Penegakan Hukum Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Banten Dalam Menindaklanjuti Penanganan Perkara Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Provinsi Banten**

Nama Mahasiswa : Fatimatuz Zuhroh
Nomor Induk Mahasiswa : 202220251035
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, ★ April 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDN 8909760023


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN 0313046804

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR (SATGAS SABER PUNGLI)
PROVINSI BANTEN DALAM
MENINDAKLANJUTI PENANGANAN
PERKARA PUNGUTAN LIAR PADA
PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI
BANTEN

Nama Mahasiswa : FATIMATUZ ZUHROH

Nomor Induk Mahasiswa : 202220251035

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **06 Mei 2024**

Jakarta, Mei 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.E., S.H., M.M., M.H.**
NIDN. 0303067202

Penguji I : **Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H.**
NIDN. 0317065701

Penguji II : **Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.**
NIDN. 0313046804

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum
NIDN . 0304027301

Dr. RR. Dijan Widijowati , S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zuhroh
NPM : 202220251035
TTL : Sampang 06 Juni 1985
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul *Penegakan Hukum Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Banten Dalam Menindaklanjuti Penanganan Perkara Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Provinsi Banten* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan



Fatimatuz Zuhroh

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zuhroh
NPM : 202220251035
TTL : Sampang 06 Juni 1985
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exlusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PERAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) PROVINSI BANTEN DALAM MENINDAKLANJUTI PENANGANAN PERKARA PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpang, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan,


Fatimatuz Zuhroh

ABSTRAK

Fatimatuz Zuhroh. 202120251035. Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Banten Dalam Menindaklanjuti Penanganan Perkara Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Provinsi Banten

Pungli yang terjadi di masyarakat telah merusak esensi dari pegawai pelayanan publik karena ketidakmampuannya dalam mengemban wewenang sebagai mana mestinya. Hal tersebut membuat citra pelayanan publik yang terjadi di Indonesia menjadi negatif. Dengan berbagai pembaharuan dan undang-undang yang mengatur tentu diharapkan agar masyarakat dapat memiliki sisi baru atau melihat perubahan pelayanan publik yang terkesan negatif, nyatanya kasus pungutan liar semakin marak terjadi pada pelayanan publik di Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dijalankan sesuai dengan isi Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satu parameternya adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat buruk maka hal tersebut menandakan bahwa kinerja instansi pemerintah belum baik. Penegakan hukum terhadap Pungli telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun tidak dijelaskan secara langsung mengenai pungli akan tetapi dapat dimaknai sebagai kegiatan pungli terdapat pada Pasal 368 KUHP dan Pasal 423 KUHP.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Satgas Saber Pungli telah melakukan 12 operasi penindakan terhadap pelaku pungli. Operasi penindakan tersebut berhasil menangkap 20 pelaku pungli. Dari 20 pelaku pungli tersebut, 15 pelaku telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Satgas Saber Pungli di Provinsi Banten memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) pada layanan publik. Upaya penegakan hukum pun dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis dan terukur.

Kata Kunci: Peran, Satgas Saber Pungli, Pungli, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Fatimatuz Zuhrih. 202120251035. *The Role of the Banten Province Task Force for Cleaning Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) in Following Up on Handling Cases of Illegal Levies on Public Services in Banten Province*

Extortion that occurs in society has damaged the essence of public service employees because of their inability to carry out authority as they should. This makes the image of public services in Indonesia negative. With various reforms and regulating laws, it is hoped that the public will have a new side or see changes in public services that seem negative. In fact, cases of illegal levies are increasingly common in public services in Indonesia. Providing good public services is part of the implementation of good governance which is carried out in accordance with the contents of Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, one of the parameters of which is how the government provides services to the community, if the services provided to society is bad then this indicates that the performance of government agencies is not good. Law enforcement against extortion is regulated in the Criminal Code (KUHP) but it is not directly explained regarding extortion, but it can be interpreted as extortion activities contained in Article 368 of the Criminal Code and Article 423 of the Criminal Code.

The research method used in this research is a normative juridical research method using statutory and case approaches. Based on the research results, it can be seen that in 2023, the Saber Extortion Task Force has carried out 12 enforcement operations against extortion perpetrators. This enforcement operation succeeded in arresting 20 extortion perpetrators. Of the 20 extortion perpetrators, 15 perpetrators have been sentenced by the court. The Saber Extortion Task Force in Banten Province has a very important role in enforcing the law and eradicating the practice of illegal levies (extortion) on public services. Law enforcement efforts are also carried out through a series of systematic and measurable step

Keyword: Role, Saber Extortion Task Force, Extortion, Public Services

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangan-Nya dengan keajaiban limpahan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul **Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Banten Dalam Menindaklanjuti Penanganan Perkara Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Provinsi Banten**

Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan masalah hukum, tetapi lebih merupakan sumbangan bukan hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada kalangan lain sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang menginginkan untuk lebih memahami mengenai tindak pidana ujaran kebencian.

Penulisan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Ubhara Jaya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Rahmat Saputra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr. Sugeng S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran

dalam memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam Menyusun tesis ini;

8. Dr. EdI Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam Menyusun tesis ini;
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menyampaikan banyak ilmu dan semoga bermanfaat kelak;
10. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang banyak membantu penulis sejak dari awal masuk kuliah sampai saat ini;
11. Kedua orang tua penulis H. Choiri dan Hj. Manis Tamar, atas kekuatan doanyalah penulis sampai di titik ini;
12. Suami tercinta Irwan Nova Ariyoga yang tentunya selalu menemani dan mensupport penulis kuliah S2;
13. Anak-anak tercinta Aisyakila Brilan Soleh, Muhammad Absyar Mubarak dan Muhammad Abidzar Uwais yang selalu memahami dan memberikan dukungan ibunya untuk melanjutkan S2.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, serta bimbingan dari para penguji untuk dijadikan pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, April 2024



Fatimatuz Zuhroh

NPM. 202220251035

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	hlm	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii	
Lembar Pengesahan	iii	
Lembar Pernyataan	iv	
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	v	
Abstrak	vi	
<i>Abstract</i>	vii	
Kata Pengantar	viii	
Daftar Isi	ix	
BAB I		
PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang Masalah	1	
1.2. Rumusan Masalah	7	
1.3. Tujuan Penelitian	7	
1.4. Kegunaan Penelitian	8	
1.5. Kerangka Konseptual	8	
1.6. Kerangka Teoritis		
1.6.1. Teori Efektivitas Hukum	11	
1.6.2. Teori Pemidanaan	17	
1.7. Kerangka Pemikiran	22	
1.8. Penelitian Terdahulu	23	
1.9. Metode Penelitian		
1.9.1. Jenis Penelitian	25	
1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian	26	
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	27	
1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28	
1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum	29	
BAB II		
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, TEORI PEMIDANAAN DAN APARAT PENEGAK HUKUM		
2.1. Teori Efektivitas Hukum		
2.1.1. Pengertian Efektivitas Hukum	30	
2.1.2. Teori Efektivitas Hukum.....	34	
2.2. Teori Penegakan Hukum	41	
2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum	46	
2.2.2. Esensi Penegakan Hukum	38	
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	42	

BAB III

PUNGUTAN LIAR (PUNGLI), SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DAN PELAYANAN PUBLIK

3.1.	Pungutan Liar	
3.1.1.	Sejarah Pungutan Liar	64
3.1.2.	Pengertian Tentang Pungutan Liar	65
3.1.3.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar	68
3.1.4.	Dampak Tindakan Pungutan Liar Terhadap Masyarakat ...	69
3.1.5.	Dasar Hukum Pengaturan Mengenai Pungutan Liar dalam Peraturan Perundang-Undangan	70
3.2.	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	
3.2.1.	Tugas dan Fungsi Satgas Saber Pungli	74
3.2.2.	Landasan Hukum dan Kewenangan Satgas Saber Pungli ...	74
3.2.3.	Peran Satgas Saber Pungli dalam Tindakan Pungutan Liar	76
3.3.	Pelayanan Publik	
3.3.1.	Unsur-Unsur Pelayanan Publik	81
3.3.2.	Jenis-Jenis Pelayanan Publik	84
3.3.3.	Konsepsi Pelayanan Publik	85
3.3.4.	Asas-Asas Pelayanan Publik	86
3.3.5.	Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik	87
3.3.6.	Standar dan Indikator Pelayanan Publik	89

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) PROVINSI BANTEN DALAM MENINDAKLANJUTI PENANGANAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) PADA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN

4.1.	Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penanganan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	93
4.1.1.	Tindakan Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satuan Tugas Saber Pungli Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik di Provinsi Banten	101
4.1.2.	Efektivitas Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Pelaku Pungutan Liar	105
4.2.	Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Satgas Saber Pungli Pada Pelayanan Publik di Provinsi Banten	112
4.2.1.	Rekomendasi untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat dalam Pencegahan Pungutan Liar	130

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan	135
5.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138

